



LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke : 34 (tiga puluh empat)
Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat/ke-9
Hari, Tanggal : Rabu, 27 Juli 2016
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Penjelasan Menkominfo dan Ketua KPI Pusat terkait dengan proses perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) (tindak lanjut Raker dengan Menkominfo dan RDP dengan Ketua dan Anggota KPI P tanggal 27 Juni 2016)
Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
2. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara
3. Ketua KPI Pusat, Dr. Judhariksawan
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker dan RDP Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Ketua KPI Pusat pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari.

II. KESIMPULAN :

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) terkait perkembangan proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang akan berakhir tahun 2016.
2. Komisi I DPR RI mengingatkan KPI Pusat wajib menyerahkan dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan isi siaran dari 10 LPS selama 10 tahun terakhir kepada Komisi I DPR RI sebagaimana hasil Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan RDP Komisi I DPR RI dengan KPI Pusat tanggal 27 Juni 2016, sebelum berakhirnya masa tugas KPI Periode 2013-2016, tanggal 27 Juli 2016.
3. Komisi I DPR RI menilai KPI Pusat Periode 2013-2016 gagal untuk melakukan evaluasi terhadap prosentase siaran iklan 10 LPS selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya, Komisi I DPR RI meminta KPI Pusat Periode 2016-2019 dibantu oleh Kemkominfo, untuk menyerahkan dokumen Laporan tersebut.
4. Komisi I DPR RI dan Menkominfo bersepakat bahwa proses pemberian perpanjangan IPP 10 LPS bisa dilanjutkan, jika dan hanya jika poin 2 dan poin 3 tersebut di atas terpenuhi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Jakarta, 27 Juli 2016

KETUA RAPAT,

TTD

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

A-111